

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Hapsari *et al.*, 2014). Indonesia telah menikmati masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang hingga pernah mengalami krisis moneter yang cukup besar pada tahun 1998. Ketika terjadinya krisis tersebut, sektor yang tetap bertahan adalah sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sementara sektor yang lainnya tumbang dikarenakan krisis (Kementerian Keuangan RI, 2016). Daya tahan UKM terhadap krisis menjadikan UKM sebagai aset yang penting bagi keberlangsungan perekonomian negara baik pada tahun-tahun krisis maupun pada saat ini (Tejasari, 2008).

Menurut UU No. 20 tahun 2008, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria aset sebesar lima puluh juta Rupiah sampai dengan sepuluh milyar Rupiah. Dan dengan omzet sebesar tiga ratus juta Rupiah sampai dengan lima puluh milyar Rupiah per tahun. Peran sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diyakini mampu menggerakkan perekonomian suatu negara (Audretsch, *et al.*, 2009). Hal ini senada dengan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa kontribusi sektor UKM di Indonesia terbukti sangat signifikan bagi perekonomian nasional dengan menyumbang 60% Produk Domestik Bruto dan menyerap 97% tenaga kerja nasional (Siaran Pers OJK: SP-38/DKNS/OJK/5/2016). Secara nyata, UKM berperan dalam mengurangi jumlah kemiskinan dengan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat (Adomoko, *et al.*, 2016).

Pentingnya peranan sektor UKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut mengharuskan dilakukannya penguatan kapasitas UKM. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan serta memperluas akses keuangan bagi UKM. Selain itu, UKM sering mengalami keterlambatan dalam pengembangannya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas, seperti masalah kapasitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, sehingga UKM sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar (Abor dan Quartey, 2010). Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peran penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern, serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM (Hapsari, *et al.* 2014).

Pengembangan UKM ini menjadikan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peranan pemerintah serta masyarakat sangat penting dalam meningkatkan pengembangan UKM ini. Pengembangan UKM semakin gencar dilakukan pemerintah dan pihak lainnya sebagai upaya meningkatkan kinerja sektor ini. Upaya mencapai pengembangan UKM ini salah satunya dilakukan melalui pengembangan UKM yang dalam pelaksanaannya mengacu pada *ASEAN Policy Blue Print for SMEs (Small Medium Enterprises) Development (APBSD)* tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Program APBSD, pengembangan UKM dilaksanakan melalui lima program yaitu: program pengembangan kewirausahaan, peningkatan kemampuan pemasaran, akses kepada keuangan, akses

kepada teknologi dan kebijakan yang kondusif. Namun, praktek di lapangan masih banyak ditemukan kendala terutama UKM tidak memiliki informasi keuangan yang transparan dan terorganisir yang menyebabkan pemberi kredit memiliki kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan usaha dari UKM (Bank Indonesia, 2012). UKM memiliki potensi yang sangat besar namun kenyataannya UKM masih memiliki berbagai hambatan. Salah satu strategi UKM adalah kemitraan dan bantuan keuangan, maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan UKM yang diharapkan dapat membantu dan mengatasi persoalan dalam UKM sehingga hasil penelitian membawa dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya (Tejasari, 2008).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Manurung dan Barlian (2012), UKM cenderung memiliki orientasi jangka pendek dalam pengambilan dua keputusan dalam bisnisnya. Hal ini terlihat dari tidak adanya konsep inovasi yang berkelanjutan dan aktivitas inti bisnis yang tidak konsisten. Pada akhirnya, pengembangan kinerja jangka panjang UKM cenderung tidak terarah dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan *performance* dan *sustainability* UKM. *Performance* atau kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan, dan ukuran yang paling banyak digunakan ROI (*Return on Investment*), disamping ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif lainnya (Glueck, *et al.* 1999). Salah satu bagian dari kinerja tersebut yaitu pertumbuhan (*growth*). Apabila *growth* suatu usaha menunjukkan adanya peningkatan, maka dapat dikatakan perekonomian negara tersebut menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sustainability atau keberlangsungan usaha pada UKM dilihat dari keberhasilan perusahaan dalam melakukan inovasi, pengelolaan karyawan dan pelanggan serta pengembalian terhadap modal awalnya. Dimana hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki orientasi untuk berkembang dan melihat peluang untuk inovasi secara berkesinambungan (Hudson, *et al.* 2001). Salah satu cara yang dapat dilakukan

adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku UKM terhadap *financial literacy*, sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik sebagaimana layaknya perusahaan besar. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Njoroge (2013), menyatakan bahwa pemilik atau pengelola UKM di Nairobi County memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi dan begitu juga penelitian dari Aribawa (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha pada UKM kreatif di Jawa Tengah.

Dahmen dan Rodriguez (2014) menyatakan bahwa diperlukan pemahaman mengenai literasi keuangan bagi pelaku usaha terutama untuk penyusunan laporan keuangan usahanya yang berguna untuk mencari pendanaan. Lebih jauh mereka juga menyatakan bahwa pentingnya pemilik usaha memahami pengetahuan keuangan guna memiliki kinerja perusahaan yang lebih bagus, sehingga memungkinkan UKM mengalami pertumbuhan bisnis yang baik. Literasi keuangan (*financial literacy*) telah menjadi perhatian khusus di berbagai negara dalam beberapa tahun belakangan ini, hal ini dikarenakan setiap negara berkeinginan untuk membentuk cara berpikir penduduknya agar memiliki pola pikir yang baik dan berkualitas dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap roda perekonomian negara itu sendiri.

Individu dengan kemampuan literasi keuangan yang baik cenderung membuat keputusan keuangan yang lebih baik dengan kesalahan manajemen yang lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka yang tidak paham dengan literasi keuangan (Njoroge, 2013; Fatoki, 2014). Penrose (1959) dalam teorinya tentang pertumbuhan perusahaan mengemukakan bahwa pengetahuan kewiraswastaan, motivasi dan aktivitas kewirausahaan dalam hal keterampilan penggalangan dana dan penilaian kewiraswastaan sangat menentukan pertumbuhan perusahaan. Kemampuan penggalangan dana mengacu pada kemampuan pemilik untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk ekspansi yang mengharuskan pengusaha atau pemilik untuk menciptakan kepercayaan pada orang lain. Serta meyakinkan mereka untuk

berinvestasi pada usaha berdasarkan keuntungan yang dicapai dengan menyimpan pembukuan yang sesuai untuk menunjukkan keuntungan usaha. Keputusan pemilik menentukan kualitas keputusan yang dibuat oleh pemilik yang sangat bergantung pada kemampuan pemilik untuk mengumpulkan informasi, menggunakan konsultasi dan memutuskan kapan dan bagaimana untuk bertindak. Oleh karena itu, pertumbuhan UKM bergantung pada seberapa baik pemilik dilengkapi dengan informasi yang baik untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dalam suatu usaha (Lusimbo, 2016).

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dimana pada dasarnya di kota yang cukup besar seperti di Padang ini menjadi pusat bisnis bagi masyarakat Sumatera Barat. Jumlah UKM di Kota Padang ini merupakan yang paling banyak dibandingkan dengan UKM lain di Sumatera Barat dengan jumlah sekitar 77.013 UKM di kota Padang. Berikut merupakan jumlah pelaku UKM di Kota Padang.

Tabel 1.1 Jumlah Pelaku UKM Kota Padang tahun 2012-2016

Tahun	Menengah	Kecil	Jumlah
2012	12.260	25.606	37.866
2013	12.580	25.690	38.270
2014	34.620	38.634	73.254
2015	35.883	39.403	75.286
2016	36.570	40.443	77.013

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa UKM di Kota Padang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2014 sebesar 73.254, dimana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 hanya sebesar 38.270. Jadi, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan UKM di Kota Padang cukup pesat dari tahun ke tahun serta menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi dan mengelola UKM di Kota Padang agar nantinya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Padang.

Di Indonesia sendiri, literasi keuangan telah menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan. Terdapat kekhawatiran bahwa masyarakat cenderung kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk mengelola dan membuat keputusan keuangan dimasa yang akan datang. Dengan adanya perhatian khusus terhadap literasi keuangan ini, diharapkan masyarakat lebih berpengetahuan, berkemampuan dan memiliki keterampilan dalam mengelola dan membuat keputusan keuangan dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi pada kestabilan sistem keuangan dan dapat mengurangi kerentanan pada sistem keuangan di Indonesia.

Literasi keuangan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan usaha pada pengusaha mikro, dimana literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kemampuan dalam membuat keputusan keuangan dan kesejahteraan rumah tangga serta kelangsungan hidup bisnis (Fatoki, 2014). Aribawa dalam penelitiannya tahun 2016 pada UMKM kreatif di Jawa Tengah juga mengkonfirmasi bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha pada UMKM. Sedangkan literasi keuangan pada UKM itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu gender dan tingkat pendidikan (Amaliyah *et al.*, 2015).

Literasi keuangan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi (Chen dan Volpe, 1998). Literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dan melakukan perencanaan terhadap keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) literasi atau perencanaan keuangan adalah cara menjalani kehidupan saat ini sesuai dengan kemampuan keuangan (secara sederhana) dan merancang kehidupan masa depan yang lebih sejahtera. Lemahnya tingkat literasi keuangan seseorang dan kurangnya pengetahuan akan pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada penggunaan layanan jasa keuangan, hal ini disebabkan karena adanya hambatan akses ke lembaga keuangan, sehingga ini akan mempermudah seseorang untuk dipengaruhi oleh penyedia layanan produk keuangan lain yang tidak termasuk dalam lembaga keuangan

resmi. Hal tersebut tentunya dapat menghambat proses pembangunan perekonomian negara.

Literasi keuangan merupakan kombinasi antara pemahaman konsumen atau investor terhadap produk dan konsep keuangan, serta kemampuan dan kepercayaan mereka untuk menghargai risiko dan peluang finansial, untuk membuat pilihan berdasarkan informasi, untuk mengetahui ke mana harus mencari bantuan dan mengambil tindakan efektif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka (Siekei *et al.*, 2013). Menurut Fatoki (2014) yang mengutip *United States Agency for International Development* (USAID, 2013) mendefinisikan pemilik atau pengelola UMKM yang mengetahui mengenai *financial literacy* sebagai “Seseorang yang mengetahui pilihan pengelolaan keuangan yang paling sesuai untuk usahanya di berbagai tahap pertumbuhan, mengetahui dimana untuk mendapatkan produk dan layanan yang paling sesuai”. Oleh karena itu, literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber keuangan secara efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai *financial literacy* ini telah dilakukan oleh Lusimbo (2016), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun pemilik atau pengelola UKM memiliki *debt management literacy* tapi mereka kurang memahami pengaruh inflasi dan suku bunga pinjaman yang mereka pinjam serta tidak membandingkan syarat dan ketentuan sebelum membeli produk keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan mereka tentang kapan harus meminjam, berapa banyak dan dari siapa, sehingga mengarah pada kinerja bisnis yang kurang optimal. Selain itu penelitian dari Nyamboga (2014), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja UKM dipengaruhi oleh keterampilan terkait dengan pembukuan, pengelolaan kredit, dan penganggaran. Penelitian dari Fatoki (2014) yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh pemilik usaha mikro. Kemudian penelitian dari Siekei *et al.* (2013) yang menunjukkan bahwa pelatihan dalam analisis keuangan, penganggaran, dan manajemen kredit

meningkatkan kinerja UKM. Serta penelitian dari Barte (2012) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengusaha memiliki tingkat *financial literacy* yang rendah seperti ditunjukkan dengan kurangnya catatan keuangan, kontrol keuntungan, dan kerugian, serta kurangnya praktik pada pengelolaan kas.

Sumatera Barat adalah provinsi yang memiliki beraneka ragam budaya dari setiap daerahnya. Masyarakat yang cinta akan tanah air wajib untuk melestarikan budayanya sendiri. Seperti dengan menggunakan produk kerajinan tangan asli dari daerahnya. Kerajinan tangan asli dari Sumatera Barat memiliki ciri khas yang berbeda dari setiap daerah, hal itulah yang membuat hasil kerajinan dari Sumatera Barat banyak disenangi oleh warganya, bahkan di daerah lainnya. Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat sendiri juga memiliki beraneka ragam kerajinan tangan yang khas dan unik, seperti sulaman, bordir, anyaman dan sebagainya yang juga dikenal oleh masyarakat luas. Usaha kerajinan tangan dapat bernilai ekonomis yang tinggi dengan bahan baku seperti kain, rotan, bambu, benang dan lainnya yang dapat dijadikan souvenir, pakaian, dan barang-barang yang digunakan sehari-hari. Industri kerajinan merupakan subsektor yang dominan dalam memberikan kontribusi ekonomi.

Peneliti tertarik untuk meneliti *financial literacy* ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai *financial literacy* tersebut. Serta merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Lusimbo (2016) yang meneliti mengenai *financial literacy* terhadap *growth* pada UKM di Kenya, peneliti menjadi tertarik untuk menerapkan bagaimana jika penelitian tersebut juga diterapkan di Indonesia khususnya di Kota Padang, mengingat berbedanya negara, masyarakat dan perekonomiannya. Kemudian peneliti juga menambahkan *sustainability* sebagai variabel dependen, karena penelitian tersebut juga masih jarang dilakukan. Adapun sektor UKM yang peneliti pilih yaitu UKM sektor kerajinan tangan di Kota Padang, mengingat masyarakat Kota Padang yang kreatif dalam membuat suatu karya atau kerajinan guna memperbaiki perekonomian keluarga juga untuk pembangunan ekonomi negara.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *financial literacy* terhadap *growth* pada UKM sektor kerajinan tangan di kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh *financial literacy* terhadap *sustainability* pada UKM sektor kerajinan tangan di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji secara empiris pengaruh *financial literacy* terhadap *growth* UKM sektor kerajinan tangan di Kota Padang.
2. Menguji secara empiris pengaruh *financial literacy* terhadap *sustainability* UKM sektor kerajinan tangan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi terutama mengenai masalah yang diteliti.

2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari penelitian ini mampu membantu UKM dalam membuat keputusan manajemen dan keuangan yang tepat untuk *growth* dan *sustainability*.
- b. Diharapkan dari penelitian ini muncul dukungan yang signifikan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya demi mendorong pengembangan *financial literacy* pada UKM.

3. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan serta sebagai kontibusi dalam ilmu Akuntansi serta juga sebagai rujukan penelitian yang akan datang.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mencegah perluasan dan terjadinya kerancuan pembahasan, maka penulis membatasi konteks penelitian dengan berfokus pada pengaruh *financial literacy* terhadap *growth* dan *sustainability* UKM sektor kerajinan tangan di Kota Padang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menguraikan dalam lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang konsep-konsep dasar dari penelitian ini, diantaranya latar belakang masalah yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini penulis menguraikan tinjauan teori yang menjadi dasar bagi pembahasan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok bahasan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya: desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel dan definisi operasional variabel, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang kajian analisis dan pembahasan dari data-data yang telah dikumpulkan dan diolah guna mendapatkan jawaban dari hipotesis yang di ajukan. Bab ini memuat analisis hasil penelitian mengenai masalah yang dibahas yaitu tentang pengaruh *financial literacy* terhadap *growth* dan *sustainability* UKM sektor kerajinan tangan di Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan, keterbatasan dan memberikan masukan atau saran bagi penelitian selanjutnya.

